

## **MANAJEMEN ISLAMI WISATA PANTAI GUNUNGKIDUL YOGYAKARTA**

### **A. Pendahuluan**

Manajemen merupakan suatu cara yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang dicita-citakan bersama. Melalui manajemen, suatu organisasi menerapkan langkah-langkahnya agar lebih terukur dan sistematis sehingga sasaran yang dituju mampu dicapainya dengan baik. Itulah mengapa suatu manajemen yang baik, dianggap menjadi salah satu indikator bahwa suatu organisasi itu baik manakala termanaj dengan baik pula. Pengelolaan suatu organisasi, penting memperhatikan prinsip dan nilai dalam sistem manajemen, dalam hal ini manajemen islami. Prinsip paling mendasar dalam sistem manajemen islami adalah apa yang telah dibangun Rasulullah Saw., yakni dasar-dasar yang digunakan dalam membangun komunitas masyarakat dan negara Madinah. Prinsip-prinsip tersebut berpengaruh besar terhadap terbentuknya peradaban gemilang umat Islam secara internasional berabad-abad kemudian. Karakteristik paling menonjol dari pola manajemen yang Rasulullah Saw. terapkan bersama para sahabat, baik dari kalangan *Anshar* maupun *Muhajirin*, adalah konsep dan praktek *Syura*, bermusyawarah (Ahmad, 2005).

Rasulullah saw., memperhatikan dan menerima pandangan-pandangan yang diajukan oleh para sahabatnya. Tema yang diperbincangkan adalah hal-hal yang relatif belum dibahas secara terperinci di dalam kitab suci al-Quran. Namun demikian, Rasulullah Saw. tetap tegas jika hal itu berkaitan dengan hukum-hukum yang pasti di dalam al-Quran. Sebaliknya, Rasulullah Saw. dan para sahabat tidak memutuskan satu perkara pun kecuali melalui pengkajian dan musyawarah apabila hal itu menyangkut perkara-perkara yang belum jelas dalam al-Quran (Qardhawi, 1999).

### **B. Rasulullah Saw. dan Prinsip Dasar Manajemen Islami**

Rasulullah Saw. menciptakan satu suasana yang kondusif bagi tumbuh berkembangnya budaya organisasi yang berasaskan nilai-nilai *syura* atau bermusyawarah, misalnya dalam menghadapi suatu peperangan. Sebelum turun ke medan perang, Beliau membiasakan berkomunikasi dengan para sahabat, budaya konsultasi, berpartisipasi, dan konsensus di tengah-tengah komunitas muslim

yang sedang dibangun. Bahkan Beliau memiliki dewan konsultan resmi yang keputusan-keputusannya akan berpengaruh terhadap kehidupan dan tatanan sosial masyarakat muslim kala itu (Abidin, 2007). Tindakan yang demikian itu wajar, karena sumber dasar Rasulullah Saw. itu al-Qur`an, sedangkan kata-kata dan perilaku Nabi menjadi acuan berpikir dan bertindak para sahabat kala itu.

Kembali kepada persoalan tersebut, maka berdasarkan konteks secara keilmuan dapat dikatakan bahwa sumber utama manajemen islami adalah al-Quran dan Hadits Nabi. Ketika berbicara tentang etika, moral, nilai, kerja dan manajemen yang islami berarti pada saat bersamaan sedang membicarakan prinsip-prinsip dasar dalam al-Quran maupun hadits Nabi. Abuznaid menjelaskan, banyak ayat-ayat al-Quran berbicara tentang arti keadilan dan kejujuran dalam bisnis perdagangan, kesantunan dan kenyamanan dalam membangun hubungan mitra kerja, dan tidak jarang al-Quran mendorong umat manusia agar selalu *update* ilmu pengetahuan dan meningkatkan *skill* mereka, supaya kualitas kerja juga meningkat dan membawa manfaat bagi individu maupun komunitas (Abuznaid, 2006). Dengan demikian, Al-Quran Hadits telah banyak berbicara prinsip manajemen sumber daya manusia maupun organisasi kerja. Seperti halnya etos kerja dalam Islam merupakan perkara paling penting, sebagaimana sebuah pekerjaan harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang profesional. Yousef menjelaskan, di dalam ajaran Islam, manajemen merupakan ajaran penting. Memiliki pemimpin juga merupakan kewajiban, dan harus selalu ada pada hampir semua lini kehidupan manusia. Hal itu karena Rasulullah Saw. pernah bersabda, *'bila mereka melakukan perjalanan, maka hendaknya menunjuk satu di antara mereka sebagai pemimpin'*. Hidup tanpa kerja, tanpa manajerial yang bagus, tidaklah berguna. Sebaliknya, keterlibatan dalam aktifitas ekonomi secara profesional merupakan kewajiban bagi umat muslim yang mampu (Yousef, 2001).

Kerja, aktifitas ekonomi, dan manajemen profesional merupakan bidang kehidupan yang tidak bisa diabaikan. Setiap individu terlibat dalam kerja dan aktifitas ekonomi yang bonafit. Dalam konteks ini, ajaran Islam hadir untuk menekankan pentingnya bekerja secara profesional. Karenanya, bekerja dalam Islam adalah kewajiban bagi mereka yang mampu bekerja. Selanjutnya, bekerja harus ditopang sifat percaya diri, pemenuhan kapasitas diri, dan kesuksesan. Semua potensi kemanusiaan harus digali dan dimaksimalkan. Hal ini dapat diartikan sebagai pentingnya manajemen sumber daya manusia dengan baik (Ali A. J., 2008).

Bekerja yang profesional merupakan perintah agama, oleh karenanya bekerja juga disebut sebagai ibadah yang mengandung pahala. Zineldin (2002) mengatakan, di muka bumi ini, manusia adalah kepercayaan Tuhan. Semua aktifitas manusia bernilai ibadah, termasuk bekerja. Tujuan utama bekerja bukan semata mempertahankan hidup dengan bermata pencaharian, tetapi lebih dari itu. Yakni, bekerja adalah kesempatan manusia untuk menikmati anugerah-anugerah Tuhan dan memanfaatkannya demi keuntungan individual maupun komunal (Zineldin, 2002).

Konsekuensinya, mengabaikan manajemen kerja yang baik sama dengan meninggalkan perintah agama dan menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Penerimaan umat muslim terhadap konsep bahwa bekerja adalah praktek ibadah membuat bekerja tidak saja bertujuan mencari keuntungan-keuntungan material yang profan, duniawi, melainkan juga meraih tujuan-tujuan spiritual-sakral-ukhrawi. Al-Buraey mengatakan, etika kerja di dalam ajaran Islam berhubungan langsung dengan pencarian kesempurnaan hidup manusia di dunia maupun akhirat, serta mencurahkan segenap tenaga, tanpa boleh berlebihan (Al-Buraey, 1988). Prinsip Manajemen Islami harus mengarah pada dua tujuan tersebut, bukan salah satunya.

Dengan demikian, prinsip-prinsip penting dan nilai-nilai dalam ajaran Islam terkait sistem manajemen Islami tidak bisa lepas dari berbagai konsep keislaman yang sering dijumpai selama ini di dalam kehidupan sehari-hari umat muslim. Konsep-konsep tersebut di antaranya adalah seperti *dzikir* atau mengingat Allah, *taqwa* atau mengerjakan semua perintah dan menjauhi segala larangan Allah, *Ihsan* atau berbuat baik (El-Ashker, 1987). Prinsip manajemen Islami juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai *'adl* atau keadilan sosial (Wilson, 2006), *amanah* atau dapat dipercaya (Tayeb, 1997), *shidiq* atau jujur dan tanpa dusta, *Itqan* atau kewaspadaan diri, *ikhlas* atau kerelaan hati dan tanpa pamrih, *shabr* atau bersabar dalam menghadapi ujian, dan yang terpenting juga adalah *syura* atau bermusyawarah (Abuznaid, 2006). Pengelolaan destinasi wisata, baik itu wisata religi maupun non-religi, dapat dikatakan telah memenuhi standard manajemen Islami apabila telah memenuhi prinsip dan nilai di atas.

### **C. Islam dan Manajemen di Indonesia**

Perkembangan konsep dan teori manajemen islami di Indonesia, khususnya di bidang pariwisata, tampak masih seputar perspektif *syar'i*. Sedikit adanya

orientasi kemanusiaan. Kurniawan Gilang Widagdyo (2015), misalnya, ketika membicarakan tentang konsep pariwisata halal di Indonesia, memaknai “halal” dalam bingkai dan menurut standar syariah. Sehingga makna pariwisata halal berarti bangunan teoritis konseptuan maupun praktek pengelolaan destinasi wisata yang *fiqh-oriented*, seperti bebas dari arena perjudian, bebas area alkohol, adanya kemudahan akses pada makanan halal dan tempat-tempat ibadah (Widagdyo, 2015). Dengan nalar yang masih *fiqh-oriented* tersebut, temuan Fahrudin Ali Sabri pun tidak mengejutkan. Fasilitas-fasilitas dan kelengkapan pariwisata Islami juga *fiqh-oriented*, hal itu dapat dilihat dari pertumbuhan hotel-hotel syariah yang signifikan. Konsep hotel syariah yang ada di Indonesia dipahami sebagai sarana kelengkapan wisata yang terjamin kehalalannya, misalnya hotel-hotel tersebut memastikan bebas alkohol, melarang persewanaan kamar untuk praktek perzinahan, pesta narkoba, dan menyediakan jaminan kenyamanan juga keamanan bagi kastemer (Sabri, 2012).

Pemaknaan manajemen wisata islami yang sedikit tampak lebih filosofis datang Rikadawati, dkk. (2014). Rikadawati, dkk., melakukan analisa sosio-linguistik terhadap diskursus wisata islami yang sedang berkembang di Indonesia maupun internasional. Menurutnya, standardisasi konsep manajemen pariwisata islami setidaknya terdiri dari tiga karakteristik utama: 1) jaminan kehalalan bagi kastemer dalam semua aspek, 2) penyediaan fasilitas untuk melakukan doa dan shalat sebagai kegiatan rutinitas sehari-hari yang tidak boleh ditinggalkan oleh kastemer muslim, dan 3) fasilitas yang ditawarkan harus memiliki semangat kuat persaudaraan dan perdamaian (Widawati, Puspito, & Setiyorini, 2014).

Lompatan konseptual tentang praktik manajemen wisata islami di Indonesia juga ditawarkan oleh Ridwan Widagdo dan Sri Rokhlinasari (2017). Dengan mengangkat kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Cirebon, Ridwan dan Sri bahwa keberadaan pariwisata yang dikelola dengan model manajemen Islami berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Industri pariwisata religi di Cirebon terbukti jitu dalam mendongkrak pemasukan daerah, dan bahkan pemerintah daerah menjadikan industri wisata religi sebagai sumber pendapatan utama daerah. Berkat wisata religi, lapangan pekerjaan terbuka lebar untuk masyarakat, pendapatan per kapita semakin meningkat, dan kehidupan di kota semakin padat. Namun begitu, Ridwan dan Sri juga menemukan dampak negatif pariwisata religi. Manajemen islami juga menyisakan sumber persoalan lain, seperti mahalnnya harga barang-barang, rusaknya lingkungan daerah sekitar, serta melunturnya nilai-nilai dan kebudayaan lokal (Widagdo & Rokhlinasari,

2017). Di sini Widagdo dan Rokhlinasari melihat aspek negatif dari destinasi wisata religi sekalipun pengelolaannya sudah sesuai dengan manajemen Islami.

Ide destinasi wisata religi yang dikelola secara Islami berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi juga didukung oleh temuan Moh Rosyid (2014). Dengan mengangkat studi kasus di kota Kudus, Rosyid mengatakan bahwa kesejahteraan ekonomi masyarakat Kudus adalah tanggungjawab pemerintah, baik daerah maupun pusat. Oleh karena itulah, pemerintah harus mengoptimalkan potensi besar destinasi-destinasi wisata religi di Kudus sebagai strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Memfasilitasi pertumbuhan wisata religi bernuansa Islami tersebut adalah strategi yang harus ditempuh di samping objek wisata non-religi. Pemerintah harus mendukung manajemen wisata religi di Kudus dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan politik, lisensi dan dukungan dana (Rosyid, 2014). Di sini Moh Rosyid melihat peran pemerintah dalam manajemen islami sangat sentral.

Di Indonesia, spirit Islam dalam manajemen hanyalah satu opsi di antara opsi lain. Diskursus relasi antara Islam dan manajemen di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari realitas sosial lain, yang mengelola destinasi wisata dengan nilai-nilai religi dan manajemen non-islami. Sebab, Indonesia adalah negara yang majemuk. Masyarakat Indonesia sangat plural. Karenanya, masyarakat non-muslim yang juga coba mengembangkan pola manajemen wisata religi terbukti berhasil. Anita Sulistiyani Gunawan, dkk., mencontohkan pengelolaan destinasi wisata religi berupa Gereja Puhsarang Kediri. Wisata religi Gereja Puhsarang ini ternyata juga bermanfaat bagi masyarakat dan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi (Gunawan, Hamid, & Endang, 2016). Islam menjadi satu di antara pilihan nilai yang bisa diinstalasi ke dalam konsep dan praktek manajemen di Indonesia.

Variasi relasi antara Islam dan manajemen di Indonesia juga bisa dilihat dari kacamata sekte atau aliran keagamaan. Di dalam tubuh Islam Indonesia itu sendiri terdapat satu aliran keagamaan yang mengakomodir kearifan budaya lokal, dan ada aliran lain yang menentangnya. Aliran Islam yang menerima kebudayaan dan kearifan lokal dapat mengembangkan pola manajemen Islami versi mereka sendiri. Misalnya, dalam sebuah penelitian, tradisi dan adat masyarakat Jember menempatkan sosok Kiyai sebagai figur panutan yang dihormati, tidak saja ketika orang yang bersangkutan masih hidup melainkan juga ketika sudah meninggal dunia. Hal ini menjadi alasan makam-makam para

Kiyai selalu dikunjungi, dan secara otomatis menjadi objek wisata religi yang dikelola oleh masyarakat setempat. Namun, tidak semua umat muslim menerima ziarah kubur dan melakukan pengelolaan profesional terhadap makam-makam kiyai/wali sebagai destinasi wisata religi (Chotib, 2015). Gagasan senada datang dari Dyah Ivana Sar yang meneliti Makam Sunan Muria, dan melihatnya sebagai destinasi wisata religi yang berkontribusi besar terhadap ekonomi masyarakat Desa Colo, Kec. Dawe, Kab. Kudus (Sari, 2010).

Pengelolaan makam-makam kiyai, waliyullah, bahkan pahlawan Islam seperti tokoh-tokoh nasional dari kalangan santri-Kiyai, otomatis mengikuti aturan-aturan dan nilai-nilai Islam. Sekalipun harus diakui bahwa fakta sosial tersebut bersifat parsial dan hanya terjadi di kalangan aliran keagamaan tertentu. Golongan keagamaan yang menerima kearifan lokal ini disebut kaum tradisionalis (Romli & Mahmada, 2016). Menyebut pengelolaan wisata religi yang sifatnya sektarian semacam ini sebagai salah satu wujud konkrit Manajemen Islami masih relatif dan *debatable*. Pentingnya ziarah kubur atau ziarah makam-makam kiyai, ulama, waliyullah, lainnya dihadapkan pada penentangan dari kelompok masyarakat tertentu, yakni mereka yang menyebut ziarah kubur sebagai perilaku bid'ah (Ali M. , 2008). Oleh karenanya, manajemen Islami di Indonesia berwajah ganda; 1) manajemen Islami yang *syar'i-oriented* dan bisa diterima semua golongan, dan 2) manajemen Islami tradisionalis, yang mengakomodir praktik budaya lokal dan diterima oleh golongan tertentu saja, yakni kaum tradisionalis.

#### **D. Karakteristik Manajemen Wisata Pantai Gunungkidul**

Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia adalah salah satu kabupaten yang memiliki jumlah kawasan pantai sangat banyak, sekalipun secara umum kawasan ini termasuk gersang. Setidaknya terdapat 102 kawasan pantai di Gunungkidul (Jogja.co, 2019). Masyarakat yang hidup di Gunungkidul pun termasuk berpenghasilan rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah sementara penduduk Kab. Gunungkidul 740.181.000 jiwa, dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2017 mencapai 5%, meningkat sekitar 0.11 % dibanding tahun 2016 yang masih 4.89 %.

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu dari lima kabupaten/kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan luas wilayah  $\pm 1.485,36$

km<sup>2</sup> atau  $\pm 46,63\%$  dari keseluruhan luas wilayah DIY, dengan garis pantai  $\pm 70$  km. Secara astronomis Kabupaten Gunungkidul terletak diantara 110°21' - 110°50' BT dan 7°46'-8°09' LS. Kabupaten Gunungkidul meliputi 18 Kecamatan dan 144 Desa, 1.431 dusun/padukuhan, 1.524 RW dan 6.822 RT, dengan Wonosari sebagai ibukota.

Di sebelah utara, Kabupaten Gunungkidul berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.

**Tabel 1**  
**Luas Wilayah Kabupaten Gunungkidul D.I Yogyakarta**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Desa	Jumlah Dusun
1	Panggang	99.80	6	44
2	Purwosari	71.76	5	32
3	Paliyan	58.07	7	50
4	Saptosari	87.83	7	60
5	Tepus	104.91	5	83
6	Tanjungsari	71.63	5	72
7	Rongkop	83.46	8	100
8	Girisubo	94.57	8	82
9	Semanu	108.39	5	106
10	Ponjong	104.49	11	119
11	Karangmojo	80.12	9	104
12	Wonosari	75.51	14	103
13	Playen	105.26	13	101
14	Patuk	72.04	11	72
15	Gedangsari	68.14	7	67
16	Nglipar	73.87	7	53
17	Ngawen	46.59	6	67
18	Semin	78.92	10	116
<b>Jumlah</b>		<b>1.485,36</b>	<b>144</b>	<b>1.431</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, 2015.

Wilayah Kabupaten Gunungkidul yang cukup luas membuatnya memiliki potensi wisata yang beragam, mulai dari kekayaan alam pantai, gua, bukit pegunungan, seni budaya dan peninggalan sejarah. Semua potensi

tersebut tersebar di hampir 18 kecamatan. Ditambah lagi Kabupaten Gunungkidul adalah bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta, yang di level internasional telah dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata. Di level nasional, Yogyakarta adalah tujuan wisata kedua setelah Provinsi Bali. Pengembangan dan pembangunan obyek wisata dan sarana pendukung perlu dilakukan secara berkelanjutan, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**Tabel 2**  
**Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik**  
**di Kabupaten Gunungkidul 2011-2015**

Tahun	Wisatawan		Jumlah
	Mancanegara	Domestik	
2011	1.299	615.397	616.696
2012	1.800	998.587	1.000.387
2013	3.751	1.333.687	1.337.438
2014	3.060	1.952.757	1.955.817
2015	4.125	2.638.634	2.642.759
2016	3.891	2.989.006	2.992.897

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, 07 Februari 2018.

Berdasarkan tabel jumlah wisatawan di Gunungkidul di atas, jumlah wisatawan yang datang terus bertambah. Hal itu mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk infrastruktur. Di antaranya semakin banyak fasilitas yang dibangun, seperti hotel, restoran atau rumah makan. Indikator pertumbuhan fasilitas wisata tersebut, salah satunya, dapat dilihat dari grafik pertumbuhan pembangunan restoran dan rumah makan pada tahun 2015-2016 di Gunungkidul yang melonjak pesat.

**Tabel 3**  
**Peningkatan Fasilitas Wisata Rumah Makan dan Restoran**  
**Di Kabupaten Gunungkidul 2015-2016**

Kecamatan	2015	2016
Panggang	-	2
Purwosari	-	7
Paliyan	-	2
Saptosari	-	-
Tepus	8	24



Tanjungsari	10	31
Rongkop	-	-
Girisubo	-	5
Semanu	-	9
Ponjong	-	12
Karangmojo	-	19
Wonosari	7	33
Playen	3	16
Patuk	2	8
Gedangsari	-	-
Nglipar	-	-
Ngawen	-	-
Semin	-	-
Gunungkidul	30	168

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, 07 Februari 2018.

Sektor wisata mendapat perhatian serius dari pemerintah kota. Bupati Gunungkidul, Ibu Badingah, menyebutkan bahwa berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2018 mencapai 17,12 persen atau turun 1,5 persen dari tahun 2017 yang mencatat angka 18,65 persen. Sedangkan pada tahun 2016, angka kemiskinan di Gunungkidul masih berada pada posisi 19,34 persen. Menurut Ibu Bupati Badingah, menurunnya angka kemiskinan di Gunungkidul dari tahun ke tahun disebabkan oleh kontribusi besar sektor pariwisata. Pandangan Ibu Bupati didukung oleh Sekda Kabupaten Gunungkidul, Drajad Ruswandono, yang juga mengklaim bahwa sektor pariwisata adalah faktor utama yang mampu menurunkan angka kemiskinan di Gunungkidul (Yuwono, 2019).

Pertumbuhan ekonomi Gunungkidul yang pesat—berkat peningkatan jumlah wisatawan dari tahun ke tahun—sejatinya tidak mengherankan. Pemkot menyadari betul potensi alam, mengingat garis pantainya berkisar sepanjang  $\pm 70$  km. Garis pantai yang panjang ini adalah modal utama bagi Pemkot untuk mengembangkannya sebagai sektor pariwisata alam pantai. Hingga saat ini, Kabupaten Gunungkidul memiliki 46 pantai yang tersebar di sepanjang garis pantai selatan.

**Tabel 4**  
**Destinasi Wisata Pantai di Kabupaten Gunungkidul**

No.	NAMA OBJEK	LOKASI
-----	------------	--------

1.	Parangendog	Girijati, Purwosari
2.	Klampok	Girijati, Purwosari
3.	Watugupit	Giricahyo, Purwosari
4.	Grigak	Girikarto, Panggang
5.	Kesirat	Girikarto, Panggang
6.	Gesing	Girikarto, Panggang
7.	Karangtelu	Girikarto, Panggang
8.	Nampu	Giriwungu, Panggang
9.	Ngunggah	Giriwungu, Panggang
10.	Ngrenahan	Kanigoro, Saptosari
11.	Nguyahan	Kanigoro, Saptosari
12.	Ngobaran	Kanigoro, Saptosari
13.	Torohudan	Kanigoro, Saptosari
14.	Butuh	Krambilsawit, Saptosari
15.	Langkap	Krambilsawit, Saptosari
16.	Parangracuk	Kemadang, Tanjungsari
17.	Baron	Kemadang, Tanjungsari
18.	Kukup	Kemadang, Tanjungsari
19.	Sepanjang	Kemadang, Tanjungsari
20.	Drini	Banjarejo, tanjungsari
21.	Krakal	Ngestirejo, Tanjungsari
22.	Slili	Sidoharjo, Tepus
23.	Ngandong	Sidoharjo, Tepus
24.	Sundak	Sidoharjo, Tepus
25.	Siung	Purwodadi, Tepus
26.	Banyunibo	Purwodadi, Tepus
27.	Watutogok	Purwodadi, Tepus
28.	Sawahan	Purwodadi, Tepus
29.	Pakundon	Purwodadi, Tepus
30.	Muncar	Purwodadi, Tepus
31.	Songlibeg	Purwodadi, Tepus
32.	Lambor	Purwodadi, Tepus
33.	Ngondo	Purwodadi, Tepus
34.	Jogan Wetan	Purwodadi, Tepus
35.	Busung	Purwodadi, Tepus
36.	Timang	Purwodadi, Tepus
37.	Jagang Kulon	Purwodadi, Tepus
38.	Weru	Purwodadi, Tepus
39.	Kelorsirat	Purwodadi, Tepus
40.	Ngetan	Purwodadi, Tepus
41.	Klumpit	Purwodadi, Tepus

42	Nguluran	Purwodadi, Tepus
43	Ngungap	Purwodadi, Tepus
44	Wediombo	Jepitu, Girisubo
45	Sadeng	Pucung, Girisubo
46	Krokoh	Songbanyu, Girisubo

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul 2006.

Keseriusan Pemerintah Kota menggarap sektor wisata Gunungkidul, termasuk wisata alam pantai, memikat hati para investor. Pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak terlepas dari besaran investasi yang masuk dari tahun ke tahun. Investasi menjadi salah satu faktor utama penopang pertumbuhan ekonomi masyarakat Gunungkidul. Tentu saja tidak ada pengaruh negatif sekalipun berdasar grafik realisasi investasi dari tahun 2013 ke tahun 2017 dapat diketahui bahwa besaran investasi di Gunungkidul adalah yang terendah dibanding kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Yogyakarta.

Pada tahun 2017, Gunungkidul berhasil mengumpulkan dana sebesar Sembilan Puluh Tujuh Miliar Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Depalan Rupiah. Berikut tabel realisasi investasi di Provinsi Yogyakarta berdasarkan Kabupaten.

**Tabel 5**

**Realisasi Investasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Berdasarkan Per Kabupaten 2013-2017**

No.	Kabupaten	Besaran
1	Kota Yogyakarta	1.875.582.182.519
2	Sleman	1.930.831.948.347
3	Kulonprogo	568.624.408.942
4	Bantul	345.332.493.711
5	Gunungkidul	97.077.459.948

Sumber: Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) DIY 2017

Catatan: data dihitung per 31 Desember 2017

Tahun 2018, Irawan Jatmiko, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT), mengatakan bahwa pemerintah Gunungkidul berhasil menarik minat dan kepercayaan para investor. Para pemegang modal besar ini menyasar kawasan pantai, di antaranya seperti Pantai Krakal. Di tahun 2018, menurut Jatmiko, investasi yang masuk ke Gunungkidul

mencapai Rp. 200 miliar. Dan pada tahun 2019, Pemkot Gunungkidul menarget angka 250 miliar rupiah (TribunJogja, Investor di Gunungkidul Harus Perhatikan Kelestarian Lingkungan, 2019).

Dalam rangka meraih jumlah investasi yang lebih besar, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terus melakukan berbagai inovasi, termasuk mendesak Peraturan Daerah (Perda) RT/RW yang harus segera direvisi dan diselesaikan. Perda RTRW ini dinilai menghambat investasi. Ibu Bupati Badingah menegaskan, kawasan pinggiran seperti pinggiran pantai masuk dalam kategori Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK). Kawasan KBAK tersebut banyak diminati investor. Jika wilayah lain seperti Bali dan Kebumen dapat dibangun, kenapa di Gunungkidul belum dapat dibangun? Revisi RTRW harus dapat menjawab tantangan itu!” (Anggabenta, 2019).

Pemerintah Kota Kabupaten Gunungkidul yang terus berupaya mengembangkan wisata pantai sejalan dengan taksiran bisnis dari para ekonom. Banyak pengamat maupun praktisi ekonomi juga melihat prospek bagus melakukan investasi di Gunungkidul, lantaran wilayahnya memiliki banyak potensi wisata. Cyrillus Harinowo, pengamat ekonomi sekaligus Komisaris Independen Bank Central Asia (BCA), mengatakan bahwa Gunungkidul adalah potensi besar. Ketika membandingkan dengan Pantai Kuta yang menjadi role model wisata pantai di Indonesia, Cyrillus mengatakan bahwa pantai-pantai yang ada di Gunungkidul (seperti yang ditunjukkan oleh Pantai Kukup, Baron, Indrayanti) telah memiliki modal yang sama. Sebagai seorang pengamat ekonomi, Cyrillus meyakini bahwa pengembangan pantai-pantai di Gunungkidul akan mampu menandingi Pantai Monterrey di Amerika Serikat, misalnya. Tergantung pada pengelolaan dan manajemen. Sebab, Indonesia sudah terbukti berhasil dalam mengelola dan mengembangkan pantai-pantai seperti Kuta di Bali atau Tanjung Aan di Lombok. Gunungkidul juga mampu melakukan hal yang serupa (Republika, 2018).

Cacatan penting bagi semua pihak, baik pemerintah maupun elemen masyarakat (terutama investor), adalah bahwa modal investasi yang masuk ke Gunungkidul belum sepenuhnya menjurus ke sektor, yakni pengelolaan wisata pantai. Per tanggal 19 Januari 2018, dana sebesar 300 miliar rupiah yang masuk ke Gunungkidul masih berkutat di banyak sektor non-wisata pantai. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT),

Irawan Jatmiko, mengatakan bahwa investasi yang masuk seperti pabrik ayam potong dari PT Widodo Makmur dan pabrik pembuatan perlengkapan militer seperti helm, sarung tangan, dari PT Molay Satrya Indonesia. Ada juga pengembangan hotel dan restoran Queen of the South. Sementara keindahan alam pantai hanyalah faktor penunjang bagi terbentuknya iklim investasi (TribunJogja, Dilirik Banyak Investor, Gunungkidul Jadi Daerah Seksi untuk Investasi, 2018).

Investor-investor yang masuk ke Gunungkidul sering kali menunjukkan sikap yang tidak profesional, semisal mengabaikan kelengkapan surat izin atau menimbulkan efek negatif terhadap pelestarian lingkungan. Irawan Jatmiko sempat meminta agar pihaknya menghentikan sementara aktivitas di kawasan peternakan unggas yang digarap PT Widodo Makmur Unggas. Menurut Irawan, dokumen AMDAL Peternakan Ayam yang digarap oleh PT Widodo Makmur masih dikaji di Dinas PUP-ESDM DIY dan pihaknya belum mengetahui kapan dokumen tersebut akan keluar. GM Geopark Gunung Sewu, Budi Martono, mengingatkan bahwa status geopark dunia di Gunung Sewu sangat mungkin dicabut oleh UNESCO, terlebih apabila konservasi lahan tersebut tidak diseriusi oleh pemerintah. Sebab, PT Widodo Makmur Unggas mengancam kelestarian alam (GunungkidulPost, 2018).

Investasi yang tidak fokus dan perilaku investor yang tidak ramah lingkungan adalah bentuk kelemahan manajemen, sehingga pengelolaan wisata pantai Gunungkidul belum optimal. Konflik sosial bermunculan. Perilaku investor tidak ubahnya kaum kapitalis pada umumnya. Adnan Pambudi, seorang aktivis lingkungan yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Pegunungan Sewu (KMPPS), mengatakan bahwa para investor yang masuk ke Gunungkidul membeli semua seluruh lahan di pantai, lalu membangun tembok-tembok tinggi dan memasang portal. Sehingga warga sekitar menjadi tidak leluasa keluar masuk. Hal ini tampak seperti upaya privatisasi (Yanuar, 2018).

Kritik dari aktivis lingkungan dan ketidaksenangan warga mendorong Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mensyaratkan agar investor selalu memperhatikan kelestarian lingkungan hidup (TribunJogja, Investor di Gunungkidul Harus Perhatikan Kelestarian Lingkungan, 2019). Hal tersebut ditujukan agar iklim investasi semakin membaik tanpa harus merusak potensi

alam sebagai modal utama pembangunan. Sebab disadari bahwa mengedepankan kepentingan investor yang kapitalistik tanpa memedulikan kerusakan lingkungan serupa dengan bom waktu, yang siap membunuh kapan saja.

## **E. Diskusi**

Manajemen destinasi wisata pantai di Kabupaten Gunungkidul telah memenuhi sebagian dari cita-cita Islam, yaitu mensejahterakan kehidupan umat. Pemerintah, investor, dan masyarakat telah bahu-membahu dalam mengembangkan wisata Gunungkidul, sehingga terbukti dari tahun ke tahun angka kemiskinan semakin menurun drastis. Begitu pun besaran nominal dana investasi yang masuk ke Pemkot Gunungkidul juga bertambah besar dari tahun ke tahun.

Di sisi lain, manajemen islami menghendaki nilai-nilai moralitas dan kearifan lokal menjadi standar utama di samping pencarian atau pengejaran keuntungan material. Keberanian sebagian investor yang masuk ke Gunungkidul tanpa mengikuti rekomendasi hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan perilaku pongah mereka yang mengundang kecemburuan sosial dari masyarakat sekitar, seperti gejala privatisasi lahan yang terbeli, adalah indikator-indikator perilaku yang tidak islami. Keberanian Pemkot Gunungkidul untuk menindak tegas para investor yang membawa dampak buruk adalah bentuk dari komitmen manajemen islami atas potensi wisata alam pantai mereka.

Dengan memperbaiki aspek manajemen dalam pengelolaan destinasi wisata alam pantai menjadi lebih Islami, Pemkot Gunungkidul dapat menjemput masa depan yang lebih cerah. Salah satu keuntungan yang dapat diperoleh adalah terjaganya lingkungan alam dari kerusakan, meningkatnya dana investasi, terbukanya lapangan pekerjaan yang lebih massif, dan tanpa terdampak efek buruk dari perilaku investor yang terlalu kapitalistik. Sebab, salah satu pesan Quran terkait konservasi alam berbunyi, *“dan apabila dikatakan pada mereka: janganlah kalian merusak bumi!, mereka menjawab: sungguh kami orang-orang yang berbuat kebaikan,”* (Qs. Al-Baqarah: 11).

Pemerintah Kota Gunungkidul yang tidak membentengi diri dengan manajemen Islami terkait seluruh potensi objek wisata, termasuk wisata alam pantainya, dapat dipastikan takluk di hadapan kepentingan para pemegang modal dan investor, baik domestik maupun asing. Jauh hari al-Quran telah mewanti-wanti tentang potensi buruk para pemegang modal besar, seperti dalam firman: *“dan jika Kami berkehendak membinasakan sebuah wilayah, Kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di wilayah itu, lalu mereka berbuat fasik di wilayah itu, sehingga pantas ketentuan (Kami) atas wilayah itu, dan Kami hancurkan sehancur-hancurnya,”* (Qs. Al-Isra’: 16).

## **F. Kesimpulan**

Pembangunan ekonomi harus digalakkan. Kesejahteraan masyarakat harus diperjuangkan. Agama Islam memberikan panduan dan prinsip-prinsip manajemen Islami yang cocok untuk mencapai tujuan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah melakukan banyak upaya untuk memaksimalkan potensi wisata alam pantainya, dan hal itu terbukti dengan meningkatnya dana investasi yang masuk serta menurunnya angka kemiskinan dari tahun ke tahun. Namun, manajemen Islami yang sudah banyak diwacanakan di ruang publik tidak seideal kenyataan. Investasi Gunungkidul, sekalipun terus bertambah besar, tetap masih rendah bila dibanding kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Masyarakat Gunungkidul tetap tertinggal dibanding empat kabupaten lain (Yogyakarta, Sleman, Kulonprogo, dan Bantul). Investasi yang masuk ke Gunungkidul pun menyisakan pekerjaan berat lainnya, yaitu upaya tetap menjaga kelestarian alam. Tidak menukar kelestarian alam dengan nilai investasi dari investor-kapitalis merupakan tantangan Pemkot Gunungkidul ke depan, sehingga potensi alam wisata optimal tanpa ada kerusakan dan kerugian di pihak masyarakat.

Para ekonom dan pengamat ekonomi telah jelas dalam menilai, yaitu Gunungkidul adalah kota dengan potensi yang luar biasa, bahkan bila dikelola dengan baik dapat menyaingi kualitas pantai di Amerika Serikat. Tetapi, idealisme ini menghadapi paradoksa, terlebih bila melihat para manajer nasional maupun lokal tidak memahami dengan betul manajemen Islami. Yakni, manajemen yang berlandaskan pada nilai-nilai dan kearifan, sehingga tujuan ekonomi semata dan materialisme murni dapat dikendalikan. Alhasil, praktek

manajemen dan pengelolaan wisata alam pantai di Gunungkidul masih membutuhkan sentuhan baru supaya sepenuhnya memenuhi standard ajaran Islam, yang ramah lingkungan, serta mengejar kebahagiaan dunia sampai akhirat. Setidaknya demi generasi yang akan datang.

### Daftar Pustaka

- Abidin, D. Z. (2007). *Al-Quran for Life Excellence*. Jakarta: Hikmah.
- Abuznaid, S. (2006). Islam and Management: What Can be Learned? *Thunderbird International Business Review*, 48 (1), 125-139.
- Ahmad, M. R. (2005). *Biografi Rasulullah: Sebuah Studi Analitis Berdasarkan Sumber-sumber yang Otentik*. Jakarta: Qisthi.
- Al-Buraey, M. A. (1988). *Administrative Development: an Islamic Perspective*. London: Kagen Paul.
- Ali, A. J. (2008). Islamic Work Ethic: A Critical Review. *Cross Cultural Management: an International Journal*, 18 (1), 5-19.
- Ali, M. (2008). *Mantan Kiai NU Meluruskan Ritual-ritual Kiai Ahli Bid'ah yang Dianggap Sunnah*. Surabaya: Laa Tasyuk Press.
- Anggabenta, R. (2019, Februari 1). *Menghambat Investasi Masuk ke Gunungkidul, Bupati Desak Perta RTRW Harus Segera Direvisi*. Dipetik Juni 17, 2019, dari Pemerintahan: <https://pidjar.com>
- Chotib, M. (2015). Wisata Religi di Kabupaten Jember. *Junral Fenomena*, 14, 206-225.
- El-Ashker, A. A. (1987). *The Islamic Business Enterprise*. London: Croom Helm.
- Gunawan, A. S., Hamid, D., & Endang, M. G. (2016). Analisis Pengembangan Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat: Studi pada Wisata Religi Gereja Puhsarang Kediri. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 32 (1), 1-8.
- GunungkidulPost. (2018, September 11). *PT Widodo Makmur Unggas Akan Dihentikan Sementara*. Dipetik Juni 17, 2019, dari <https://gunungkidulpost.com>



- Jogja.co. (2019). *Update.. Daftar 102 Pantai di Gunungkidul Jogja*. Dipetik Mei 30, 2019, dari Wisata: [www.jogja.co](http://www.jogja.co)
- Qardhawi, Y. (1999). *Beriteraksi dengan Al-Quran*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Republika. (2018, September 25). *Prospek Wisata Gunungkidul dari Kaca Mata Ekonom*. Dipetik Juni 17, 2019, dari <https://www.republika.co.id>
- Romli, M. G., & Mahmada, N. D. (2016). *Islam Kita, Islam Nusantara: Lima Nilai Dasar Islam Nusantara*. Tangerang: Ciputar School.
- Rosyid, M. (2014). Strategi Optimalisasi Wisata Syariah di Kudus. *Equilibrium*, 2 (2), 243-269.
- Sabri, F. A. (2012). Perkembangan Hotel Syariah di Indonesia: Mengonsep Pariwisata Islami. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 18 (2), 114-122.
- Sari, D. I. (2010). *Objek Wisata Religi Makam Sunan Muria*. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret.
- Tayeb, M. H. (1997). Islamic Revival in Asia and Human Resource management. *Employee Relations*, 19 (4), 352-264.
- TribunJogja. (2018, Januari 19). *Dilirik Banyak Investor, Gunungkidul Jadi Daerah Seksi untuk Investasi*. Dipetik Juni 17, 2019, dari <https://jogja.tribunnews.com>
- TribunJogja. (2019, Maret 7). *Investor di Gunungkidul Harus Perhatikan Kelestarian Lingkungan*. Dipetik Juni 17, 2019, dari <https://jogja.tribunnews.com>
- Widagdo, R., & Rokhlinasari, S. (2017). Dampak Keberadaan Pariwisata Religi terhadap Perkembangan Ekonomi Masyarakat Cirebon. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9 (1), 59-74.
- Widagdyo, K. G. (2015). Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia. *Tauhidinomics*, 1 (1), 73-80.
- Widawati, R., Puspito, H., & Setiyorini, D. (2014). Perspektif Sociolinguistik: Dialog antara Islam dan Non-Islam tentang Standardisasi Pariwisata Islami. *Jurnal Manajemen Resort dan Leisure*, 11 (2), 61-70.

- Wilson, R. (2006). Islam and Business. *Thunderbird International Business Review*, 48 (1), 109-123.
- Yanuar. (2018, Maret 17). *Banyak Resort Dibangun, Pantai-pantai Gunungkidul Terancam Privatisasi*. Dipetik Juni 17, 2019, dari Travel: <https://www.liputan6.com>
- Yousef, A. D. (2001). Islamic Work Ethics: A Moderator Between Organizational Commitment and Job Satisfaction in a Cross-Cultural Context. *Personnel Review*, 30 (2), 152-169.
- Yuwono, M. (2019, Februari 28). *Sektor Pariwisata Mampu Kurangi Kemiskinan di Gunungkidul*. Dipetik Juni 27, 2019, dari <https://yogyakarta.kompas.com>
- Zineldin, M. (2002). Globalization, Strategic Co-operation and Economic Integration Among Islamic/Arab Countries. *Management Research News*, 25 (4), 35-61.